

Judul : MKD Sarankan Setnov Bersikap Sebelum Putusan
Tanggal : Selasa, 05 Desember 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

MKD Sarankan Setnov Bersikap Sebelum Putusan

Jakarta, Pelita

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifuddin Sudding berharap Ketua DPR Setya Novanto segera mengambil sikap sebelum MKD mengambil putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

"Saya kira mudah-mudahan beliau akan mengambil satu sikap sebelum ada putusan MKD," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/12).

Dikatakan Sudding saat MKD datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu untuk memeriksanya, Ketua Umum DPP Partai Golkar itu juga menyadari posisinya dan beliau akan mengambil satu sikap dalam waktu dekat.

Namun Sekretaris Jenderal Partai Hanura ini mengaku tidak tahu kapan Novanto akan mundur dari jabatannya, apakah sebelum atau sesudah mendapat sanksi dari MKD.

"Tapi yang jelas dia (Setya Novanto—Red) sangat menyadari posisinya dan meminta maaf terhadap apa yang dialami saat ini dan akan mengambil suatu sikap dalam waktu

dekat," ujarnya.

Sudding menilai seharusnya Novanto dalam posisi sebagai Ketua DPR sadar atas tugas-tugasnya yang tidak bisa diwakilkan kepada pimpinan lainnya.

Pimpinan dan anggota MKD mendatangi Gedung KPK Kamis (30/11) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etik.

Saat ini MKD meminta keterangan Kesekjen dan Pimpinan DPR untuk memverifikasi kembali pelaporan yang ditujukan kepada Setya Novanto, kata Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami cek lagi ke sekjen di tata tertib bagaimana, lalu dengan Pimpinan DPR kami tanya apakah yang dimaksud pelapor, verifikasi dengan Pak Novanto kemarin bagaimana



Syarifuddin Sudding

na. Sesuai dengan aturan dan mekanisme," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dasco mengatakan MKD baru bisa menilai laporan tersebut setelah ada hasil verifikasi pelaporan yang ditujukan kepada Novanto.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) akan mencegah potensi kubu pro-Setya Novanto menggagalkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Ya, yang menentukan ada AD/ART, bahwa 2/3 yang minta munaslub harus dijalankan," kata JK yang juga politisi senior Partai Golkar kepada pers di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin.

Terkait waktu penyelenggaraan Munaslub Golkar, Wapres meminta publik untuk menunggu karena pada intinya sebagian besar Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan II menghendaki dan telah mengirimkan permintaan munaslub kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. "Tunggu saja," tegas JK seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir terhadap kekuatan pro-Setnov di internal Golkar, terutama di tingkat DPP, berpotensi menggagalkan penyelenggaraan munaslub.

Doli menilai sikap DPP yang tidak segera merespons surat rekomendasi atau usulan 2/3 lebih DPD merupakan indikasi kuat bahwa di tubuh DPP ada orang-orang Setya Novanto yang masih tidak mengingink-

an munaslub. Bakal calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto siap menerima amanah dan mengamankan pencalonan Presiden Joko Widodo pada pemilu presiden 2019-2024.

"Saya terima amanah dukungan dari SOKSI ini dan siap mengamankan pencalonan Presiden Joko Widodo pada pilpres 2019-2024," kata Airlangga saat menerima surat dukungan dari Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dari Ketum Depinas SOKSI Ade Komarudin di rumahnya di Jakarta Senin.

Airlangga menegaskan dirinya tidak akan menyalahi dukungan yang ada dan akan menjalankan amanah yang diterimanya. Dia juga menegaskan bahwa di Partai Golkar tidak ada kubu-kubuan, semua bersaing untuk memperbaiki partai yang saat ini sedang tidak dalam keadaan normal.

Airlangga mengaku optimistis dirinya akan dapat memenangi persaingan perebutan kursi ketum DPP Partai Golkar ■ (did)